

Refleksi 70 Tahun PBB

TANGGAL 24 Oktober 2015 tepat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berumur 70 tahun. Usia 70 tentu merupakan momentum baik untuk menoleh ke belakang sekaligus berefleksi sejauh mana telah sukses mencapai kemajuan, yaitu mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional; mempererat tali persahabatan antara bangsa-bangsa yang didasarkan pada persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Juga berusaha menciptakan dan menjaga perdamaian dunia; serta menciptakan/menjalinkan kerja sama dalam (upaya) penyelesaian berbagai macam persoalan internasional berkait ekonomi, sosial, kebudayaan, kemanusiaan, serta menyempurnakan penghargaan atas hak-hak umat manusia dan kebebasan asasi. Selain itu, berefleksi tantangan apa saja yang dihadapi sekarang?

PBB resmi didirikan tak lama usai Perang Dunia (PD) II, namun prosesnya dimulai saat perang berkecamuk. PD II membuat sejumlah pemimpin dunia kala itu — semisal Franklin D Roosevelt dari Amerika Serikat (AS), Joseph Stalin dari Rusia (Uni Soviet) dan Winston Churchill dari Inggris — menginisiasi pembentukan PBB lantaran Liga Bangsa Bangsa (LBB) yang didirikan pasca-PD I dipandang sudah tidak sanggup lagi menegakkan serta menjaga perdamaian global.

Pada awal pembentukan, PBB hanya beranggotakan 51 negara. Keanggotaan terus bertambah. Pada 1963 anggotanya berjumlah 113 negara, dan sekarang 193 negara. Kebertambahan jumlah anggota tersebut tentu merupakan keberhasilan bagi organisasi internasional yang kini dipimpin oleh Ban Ki-moon dari Korea Selatan itu. Banyaknya negara-bangsa yang bergabung, pada satu sisi bisa dianggap sebagai berkah. Pasalnya, semakin banyak negara bergabung makin banyak pula iuran yang diterima PBB. Namun di sisi lain bisa menjadi beban tidak ringan terutama apabila keadaan negara anggota tidak stabil baik dari segi sosial, ekonomi maupun politik.

Kenyataannya sampai hari ini, tidak sedikit anggota PBB yang lebih banyak memberi masalah ketimbang memberi solusi karena berbagai hal seperti kemiskinan, pengungsi, dan konflik. Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan ataupun bentuk keterbelakangan, PBB memiliki strategi jitu dengan memberlakukan Millennium Development Goals (MDGs) 2015. MDGs 2015 mewajibkan pemerintah setiap negara anggota membuat laporan obyektif secara rutin atas capaian pembangunan sosial dan ekonomi tiap tahun dalam kurun 15 tahun terakhir.

Pertanyaannya, sejauh mana target MDGs 2015 terpenuhi? Untuk menjawabnya secara pas tentu diperlukan pengetahuan yang memadai atas capaian target MDGs 2015 setiap negara anggota selama 15

Oleh **Chusnan Maghribi**



“PBB menghadapi masalah khusus berupa tuntutan reformasi Dewan Keamanan (DK) yang sudah sejak 1990-an dikumandangkan oleh sebagian anggota, terutama kelompok negara berkembang tergabung dalam Gerakan Non-Blok (GNB).”

tahun belakangan.
Tantangan Berat

Dan, tampaknya tidak sedikit anggota yang dianggap (dinilai) belum memuaskan. Penetapan MDGs pasca-2015 pada Sidang Umum PBB September 2015 menyiratkan adanya target MDGs 2015 yang belum tercapai.

Lalu, berkait penciptaan dan penjagaan keamanan serta perdamaian global, PBB kini masih menghadapi tantangan berat. Masih berkecamuknya berbagai konflik (perang) di banyak negara di berbagai kawasan semisal konflik lama Palestina-Israel, Kongo, Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, Afghanistan, Yaman, ancaman kelompok radikal ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang makin memperparah konflik di Irak dan Suriah, maupun konflik-konflik lain merupakan tantangan berat.

Di luar itu semua, PBB menghadapi masalah khusus berupa tuntutan reformasi Dewan Keamanan (DK) yang sudah sejak 1990-an dikumandangkan oleh sebagian anggota, terutama kelompok negara berkembang yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok (GNB). Substansi tuntutan reformasi tersebut adalah negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia menginginkan penambahan jumlah anggota tetap maupun tidak tetap DK, yaitu dari 15 anggota (5 negara anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap) menjadi antara 20 sampai 25 negara anggota, agar keterwakilan kawasan di DK benar-benar representatif.

Tetapi tuntutan tersebut belum mendapat respons positif, khususnya dari negara anggota tetap selaku pemegang hak veto di DK. Selama lima pemegang hak veto belum merespon positif, dipastikan kelompok negara berkembang akan terus mengumandangkan tuntutan itu.

Jadi, pada hari jadinya yang ke-70 sekarang, PBB selain perlu menoleh ke belakang untuk sekadar mengetahui keberhasilan apa saja yang sudah dicapai, juga penting untuk mengurai tantangan apa saja yang sedang dan akan dihadapi, sebagai langkah awal menyusun strategi jitu untuk upaya mengatasinya. (43)

— **Chusnan Maghribi**, *alumnus Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)*

Email Baru

Berhubung email lama mengalami gangguan, kini kirimkan artikel **wacana nasional** ke:
wacana_nasional@suaramerdeka.com,
dan: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 7.000 karakter *with space*, sertakan pasfoto pose santai dan untuk **wacana lokal** ke:
wacana_lokal@suaramerdeka.com,
dan: wacana.lokal@gmail.com.
Panjang maksimal 6.000 karakter *with space*, sertakan pasfoto pose santai.. (Red)